



**MODEL KURIKULUM
BAGI PESERTA DIDIK SOSIAL EKONOMI RENDAH
PENDIDIKAN MENENGAH**

**PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2007**

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosialnya, dan negara menjamin setiap warga negaranya dapat memperoleh minimal pendidikan dasar. Namun untuk mewujudkan hasil amandemen tersebut memerlukan anggaran sangat besar, disisi lain kemampuan pemerintah masih terbatas dan masih banyak masyarakat berkondisi sosial ekonomi sangat rendah. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan adalah 39,05 juta jiwa atau 17,75%. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.

Kegiatan ini sebagai: 1) panduan untuk pemangku kepentingan dalam mengembangkan Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik dalam kategori sosial ekonomi rendah, 2) alternatif kepada sekolah untuk memilih bentuk layanan khusus dan pedoman kepada pihak pengambil keputusan dalam hal Pendidikan Layanan Khusus.

Pengembangan pengembangan model dan penyempurnaan model peserta yang dilibatkan adalah Guru, PT, Widyaiswara, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan pada pelaksanaan ujicoba melibatkan kepala sekolah dan guru-guru di SMA 18 dan SMK 11 Bandung.

Kegiatan dilakukan melalui: workshop kajian konsep bersama-sama dengan ahli dan praktisi, kajian kebutuhan lapangan, penyusunan kerangka model, pengembangan model, ujicoba model, presentasi model, dan penyempurnaan model.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya model kurikulum bagi peserta didik sosial ekonomi rendah. Dimana disepakati bahwa sekolah wajib menampung peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi rendah. Dalam pengembangan KTSP harus memperhatikan: 1) Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Badan Standar Nasional Pendidikan, 2) Kondisi geografis sekolah, 3) Potensi sekolah, yaitu: sarana prasarana, Peserta didik, dan Pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah harus berkoordinasi dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. Sekolah harus berpijak pada panduan yang dikeluarkan dari BSNP, disamping itu dapat memperhatikan 3 aspek: 1) Prinsip Pengembangan KTSP PLK, yaitu: fleksibel, competence, independent, confident; 2) Karakteristik Peserta Didik, yaitu: siswa bekerja dan punya waktu, siswa bekerja dan tidak punya waktu, siswa ingin bekerja/berwirausaha, Siswa ingin melanjutkan pendidikan; 3) Perlakuan Khusus, yaitu: Switch, Penerapan SKS, Pengaturan Jadwal Khusus, Pemberdayaan ekonomi, 4) Tujuan akhir, yaitu: wirausaha, bekerja, dan melanjutkan ke PT.

Melihat realita permasalahan yang ada pada jenjang pendidikan menengah berkaitan dengan kebutuhan dunia luar, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus. Pembekalan karakteristik kompetensi tertentu yang berbeda antara SMA dan SMK perlu dijembatani agar pendidikan menengah dapat memberikan layanan yang lebih variatif. Perlu dipikirkan pengembangan konsep *multi exit multi entry* pada jenjang pendidikan menengah. Khususnya peserta didik kategori sosial ekonomi rendah dapat memperoleh layanan khusus melalui kebijakan tersebut. Penggunaan sistem SKS akan menjadi pilihan dan jika perlu dibuatkan kurikulum khusus untuk mereka.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Masalah.....	2
C. Perumusan Masalah.....	2
D. Tujuan.....	3
E. Hasil yang Diharapkan.....	3
F. Kegunaan.....	3
BAB II. PENGEMBANGAN MODEL.....	4
A. Landasan Hukum.....	4
B. Landasan Empiris.....	4
C. Landasan Teori.....	5
1. Kemiskinan dan Ciri-cirinya.....	5
2. Pendidikan Layanan Khusus dan Kurikulum.....	6
a. Sekolah Menengah Atas.....	7
b. Sekolah Menengah Kejuruan.....	7
BAB III. STRATEGI PENGEMBANGAN.....	9
A. Pengembangan KTSP.....	9
B. Penekanan dalam Pengembangan KTSP.....	10
1. Prinsip Pengembangan KTSP.....	10
2. Karakteristik Peserta Didik.....	10
3. Perlakuan Khusus.....	12
4. Tujuan Akhir.....	12
C. Pengembangan Selanjutnya.....	13
Diagram Pengembangan Kurikulum PL Sosial Ekonomi Rendah.....	14
BAB IV. METODOLOGI.....	15
A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan.....	15
B. Strategi Kegiatan.....	15
C. Unsur yang Terlibat.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, tanpa kecuali! Karena hal ini menyangkut nasib generasi bangsa, yang juga menyangkut harkat dan martabat bangsa kita di masa depan agar menjadi masyarakat yang cerdas. Mencerdaskan anak bangsa bukanlah pekerjaan mudah, karena untuk mencerdaskan mereka yang berjumlah puluhan juta, bahkan ratusan juta, apalagi dengan kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kultur yang berbeda-beda.

Pendidikan bermutu tinggi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang mengharapkan pendidikan gratis! Demikian juga harapan sebagian pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang peduli pada nasib anak bangsa. Keinginan masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan bermutu adalah suatu hal keinginan yang wajar. Di pihak lain, masyarakat miskin/tidak mampu bukannya tidak memiliki kemauan, tetapi memang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah solusi.

Untuk mencapai pendidikan bermutu tinggi mutlak diperlukan sumber daya pendidikan yang lengkap dan representatif. Sumber daya pendidikan demikian memerlukan anggaran sangat besar. Namun kemampuan pemerintah masih terbatas, di sisi lain masih banyak masyarakat kita berkondisi sosial ekonomi sangat rendah.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan membengkak menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen, dari Susenas 2005 berjumlah 35,10 juta atau 15,97 persen. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.

Meningkatnya kemiskinan di Indonesia berdampak pada semakin tingginya anak putus sekolah, karena (sebagian dari) mereka (tidak mampu membayar uang sekolah dan sebagian lain) harus mengutamakan bekerja untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Pendidikan menjadi kurang penting menurut kelompok masyarakat ini.

Sebagian penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (kurang lebih 70%) termasuk anak-anak yang sebagian besar tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan, sumber daya, dan infrastruktur untuk mengembangkan seluruh potensi mereka. Sebagian besar orang tua dari anak-anak tersebut mengalami masalah ekonomi yang menyebabkan mereka (anak-anak dari keluarga miskin) bekerja di ladang atau pergi ke kota dan mengorbankan pendidikan mereka.

Sebagian dari Anak-anak yang pergi ke kota sebagian menjadi anak jalanan, dan tinggal di daerah kumuh perkotaan dekat dengan tempat mereka bekerja, tidak terdaftar dalam administrasi kota tersebut, dan bekerja di sektor informal sebagai pedagang, pengamen, pengemis, dan lain-lain.

Hasil Amandemen UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 31 Ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sesuai dengan pasal 31 di atas jelaslah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosialnya, dan

negara menjamin setiap warga negaranya dapat memperoleh minimal pendidikan dasar.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49 yang berbunyi: "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

Kemudian dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan *tidak mampu dari segi ekonomi*." Tidak mampu dari segi ekonomi berarti sangat kecil aksesnya terhadap pendidikan karena pendidikan menjadi mahal.

B. Ruang Lingkup Masalah

Selain biaya pendidikan, ada beberapa faktor lain yang menghambat peserta didik dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah untuk bersekolah yaitu:

1. *Waktu*: sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membantu orang tua mencari nafkah.
2. *Jumlah sekolah yang terbatas*: SMA dan SMK yang memberikan layanan khusus kepada siswa sosek rendah masih terbatas.
3. *Lokasi*: letak sekolah yang jauh mengharuskan peserta didik mengeluarkan biaya transportasi.
4. *Faktor psikologis*: seperti: rendah diri dan motivasi rendah karena kurangnya dukungan orang tua untuk bersekolah, banyak orang tua dengan tingkat pendidikan rendah sulit untuk memahami arti dan fungsi pendidikan anaknya, dan kurangnya motivasi belajar dan daya saing dalam diri anak dan keluarga miskin.
5. *Proses pembelajaran*: kenyataan menunjukkan bahwa dalam layanan pembelajaran masih sama untuk semua peserta didik. Belum ada perbedaan (diversifikasi) layanan pada peserta didik yang beragam karakteristiknya.
6. *Pandangan hidup*: cara pandang yang salah pada masyarakat bahwa bersekolah adalah menghabiskan biaya. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa setelah lulus sekolah pun belum tentu bisa langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan.

C. Perumusan Masalah

Karena keterbatasan beberapa faktor di atas, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu model pendidikan layanan khusus yang dapat mengakomodasi keterbatasan peserta didik dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), sehingga mereka juga dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan, seperti sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah.

D. Tujuan

1. **Umum**, memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam mengembangkan Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik dalam kategori sosial ekonomi rendah sehingga diharapkan nantinya berguna bagi:
 - a. Sekolah yang akan memberikan layanan khusus kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
 - b. Unit/Instansi pemerintah terkait yang ingin memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
 - c. Masyarakat peduli pendidikan yang ingin memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
 - d. Puskur dalam melayani semua *stake holders* yang akan memberikan pendidikan layanan khusus kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial ekonomi rendah.
2. **Khusus:**
 - a. Memberikan alternatif kepada sekolah untuk memilih bentuk layanan khusus;
 - b. Memberikan pedoman kepada pihak pengambil keputusan dalam hal Pendidikan Layanan Khusus.

E. Hasil yang Diharapkan

Model kurikulum untuk peserta didik sosial ekonomi rendah di tingkat SMA dan SMK

F. Kegunaan

Model kurikulum untuk peserta didik sosial ekonomi rendah di tingkat SMA dan SMK diharapkan nantinya berguna bagi:

1. Puskur dalam melayani semua stake holder yang akan memberikan pendidikan layanan khusus kepada peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah.
2. Unit/Instansi terkait yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
4. Sekolah/Guru yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.

BAB II

PENGEMBANGAN MODEL

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada: Pasal 1 ayat (19); Pasal 5 ayat (1); Pasal 18 ayat (1) (2) (3) (4); Pasal 32 ayat (2); Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4); Pasal 36 ayat (1) (2) (3) (4) Pasal 37 ayat (1); Pasal 38.
3. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pasal 1 ayat (5) (13) (14) (15); Pasal 5 ayat (1) (2); Pasal 7 ayat (1) (2) (6) (7): (8); Pasal 8 ayat (1) (2) (3); Pasal 10 ayat (1) (2); Pasal 11 ayat (2) (3): (4): Pasal 13 ayat (1) (2) (3) (4); Pasal 16 ayat (1) (2) (3) (4) (5); Pasal 17 ayat (1): (2): Pasal 18 ayat (1) (2) (3); Pasal 20.
4. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49

B. Landasan Empiris

Kemiskinan (ekonomi rendah) terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state* yang telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas karena mereka dituntut untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life* (James, C. Scott, 1981), seperti mengorbankan anak-anaknya untuk bekerja.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak berkesinambungan dan cenderung mengurangi kemiskinan yang hanya bersifat sementara. Hal itu tampak dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terkait erat dengan adanya kucuran dana, dan apabila program-program tersebut dihentikan, maka jumlah angka kemiskinan akan kembali meningkat. (Revrisond Baswir, Pengamat Ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit)

Sedangkan berbagai studi menunjukkan pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (*critical mass*), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan.

Hasil observasi empirik di lapangan mengindikasikan, bahwa sebagian besar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri.

Temuan tersebut tampaknya mengindikasikan bahwa pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh atau mengembangkan kemampuan adaptasi peserta didik. Studi itu juga memperoleh gambaran bahwa sebagian lulusan SMK tidak bisa diserap di lapangan kerja, karena kompetensi yang mereka miliki belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi itulah, antara lain yang menjadi alasan, bahwa Kurikulum SMK edisi 1999 perlu ditinjau kembali kesesuaian dengan kompetensi yang dituntut oleh pasar kerja, serta kebutuhan pembekalan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembelajaran tidak hanya terbatas ruang dan waktu, karena belajar tidak hanya terpaku pada dinding kelas dan jadwal sekolah. Sebagai pemecahan yang dilakukan apabila peserta didiknya tidak selalu bisa hadir di sekolah dan mengikuti jadwal sekolah adalah salah satunya dengan tutorial, moduler, model rumah singgah ataupun

dengan lain. Ini dilakukan agar peserta didik yang tidak mempunyai waktu khusus untuk sekolah dapat tetap sekolah sekaligus melakukan aktivitas yang biasa dilakukannya, yang biasanya mencari uang untuk membantu orang tuanya.

D. Landasan Teori

1. Kemiskinan dan Ciri-cirinya

Oscar Lewis menyatakan, bahwa orang-orang miskin itu adalah kelompok sosial yang mempunyai 'budaya miskin' (*poverty culture*) yang tampak dari tanda-tanda seperti berikut: merasa tidak berharga, tidak berdaya, rendah diri, dan ketergantungan. Wolf Scott meperincinya lebih jauh dengan mengatakan bahwa ciri-ciri kemiskinan adalah bahwa pendapatan uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-materi sangat rendah; tidak berpendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan aksesibilitas akan transportasi. Di samping itu mereka pun kurang atau tidak mempunyai aktiva dalam bentuk tanah dan rumah. Akan tetapi Scott pun tidak melupakan tanda-tanda lainnya yang mungkin lebih signifikan daripada tanda-tanda lahiriah yang melekat pada konsep kemiskinan. Yaitu, kemiskinan non-materi yang meliputi pelbagai jenis kebebasan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak atas rumah-tangga, dan hak untuk meraih kehidupan yang layak.

Robert Chambers menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat negara-negara sedang berkembang, khususnya masyarakat pedesaan, dilantarkan oleh faktor-faktor kemalangan (*disadvantages*) yang ternyata kait-mengait dengan hal-hal seperti berikut ini:

- a. Kemiskinan (*poverty*), merupakan gambaran tradisional mengenai kemiskinan yang ditandai oleh rumah yang hampir runtuh dengan dinding bolong-bolong yang ditembus angin yang sayangnya jauh dari sejuk, perlengkapan hidup yang nyaris tidak punya, kecuali sehelai dua helai tikar yang sudah lapuk tertimpa hujan dari genting yang bocor dan beberapa tembikar yang mutunya asal-asalan, cempor yang kelap-kelip atau lampu listrik yang tidak lebih dari 10 watt, tidak memiliki jamban sendiri (kecuali jamban kolektif atau tepian sungai). Tanda-tanda kemiskinan itu pun diperlengkapi oleh pendapatan yang kecil dan tidak menentu sehingga utang pun perlu ditempuh agar dapat menutup lubang dengan menggali lubang baru. Di negara kita mereka seringkali menjadi korban kekerasan (*violence*) para rentenir dan mereka yang ingin mendirikan gedung di atas tanah, dengan dalih ketertiban kota dan sudah tentu 'rasa malu terhadap para wisatawan mancanegara'.
- b. Kelemahan fisik (*physical weakness*) yang karena lemahnya kesehatan (karena gizi yang sangat buruk, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang jauh dari mencukupi) menyebabkan rasio dependensi yang besar antara keluarga mereka dengan anggota keluarga dewasa yang masih sehat dalam mencari nafkah hidup. Atau sebaliknya, keluarga yang masih lumayan kuat itu dibebani anggota-anggota keluarga selebihnya yang berpenyakit, seringkali kronis. Mereka yang masih kuat (*survivors*), karena jiwa komunalismenya yang masih tersisa yang mereka bawa dari desa, harus membagi-bagikan rizkinya yang didapatnya hari itu dari pekerjaan serabutan. Cara mereka memecahkan masalah seperti itu seringkali fatalistik. Siapa tahu penjualan anak-anak dan perempuan (*trafficking*) yang semakin menggejala belakang ini dilakukan sebagai suatu cara yang mungkin dianggap dapat memecahkan lingkaran setan dan semakin beratnya rasio dependensi tersebut.

- c. Kerapuhan (*vulnerability*) yang disebabkan oleh tiadanya cadangan atau tabungan untuk bisa bertahan hidup, baik dalam bentuk uang maupun barang. Ketika tertimpa sakit, ayah, ibu atau anak meninggal, gagal panen, atau warungnya digusur, mereka harus menyerah, sebab dengan sikap fatalistiklah satu-satunya jalan yang harus ditempuh.
- d. Keterasingan (*isolation*) baik geografis maupun ekonomis menyebabkan aksesibilitas mereka terhadap informasi sangat kecil atau bahkan terputus sama sekali dari sumber-sumber informasi yang bermakna. Sebaliknya sumber-sumber informasi pun (termasuk media massa), karena pertimbangan biaya dan efisiensi, seringkali menjauh dari mereka.
- e. Ketakberdayaan (*powerlessness*) yang ditunjukkan oleh ketakberdayaan terhadap orang-orang yang mengeksploitasi kelemahan mereka, termasuk para pengijon, lintah darat, tukang riba, dan sudah tentu para tukang pukul. Ketakberdayaan ini pun menjadi-jadi ketika produk mereka yang tidak memenuhi standar internasional harus berhadapan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asing di pasar yang sama. Mereka pun tidak berdaya ketika teknologi mereka dicuri oleh orang-orang asing (yang kemudian mempatenkannya secara internasional), seperti terjadi pada teknologi batik dan tempe. Dengan cara itu, meskipun mereka mampu memproduksi dengan kualitas yang terbaik, namun karena persoalan paten internasional, mereka harus menerima kedudukannya yang semakin dimarjinalkan dari pasar domestik maupun global. Dan, pemerintah pun tampaknya tidak begitu tertarik pada masalah ini. Mungkin karena kesibukannya dalam melayani permintaan IMF yang tidak putus-putusnya.

2. Pendidikan Layanan Khusus dan Kurikulum

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Sektor pendidikan adalah salah satu dari beberapa sektor yang menjadi perhatian kita bersama. Bahkan di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama di antara beberapa pihak seperti sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik sosial ekonomi rendah merupakan bagian dari PLK yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 pasal 32 ayat 2.

Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang No.23 tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 dan PP No. 19 Pasal 1 ayat 13).

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP No. 19

Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15). Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 16)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan untuk melayani peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi.

a. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta rasa keindahan dan harmoni yang diperlukan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

a.1. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA.

a.2. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja atau mengikuti pendidikan yang lebih tinggi sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK adalah mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan tertentu. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa ada sebagian lulusan SMK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan asumsi bahwa kompetensi produktif lebih ditekankan pada SMK maka peluang berkompetisi akademik dengan SMA menjadi lebih kecil. Hal ini menuntut layanan khusus yang berisi kompetensi akademik untuk peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN

A. Pengembangan KTSP

Sekolah wajib menampung peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi rendah. Namun sebelum sekolah membuka pendidikan layanan khusus seperti itu dalam pengembangan KTSP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Badan Standar Nasional Pendidikan.*

2. *Kondisi geografis sekolah*

Kondisi geografis suatu daerah menjadi perhatian penting dalam mengembangkan KTSP. Perbedaan karakteristik wilayah harus diakomodasi dalam kurikulum yang akan dilaksanakan. Keragaman kondisi geografis dapat terjadi pada masyarakat yang berada di daerah miskin perkotaan maupun pedesaan, pantai, pegunungan, pertanian, pariwisata, industri, dan sebagainya. Sekolah dapat memberikan mata pelajaran vokasi yang sesuai dengan kondisi geografis daerah. Misalnya daerah pertanian dapat mengembangkan pendidikan vokasi yang berkaitan dengan bidang pertanian seperti pembuatan alat perontok padi, pengolahan kompos dan sebagainya. Untuk daerah pariwisata dapat diberikan pelajaran guiding. Daerah perkotaan yang heterogen dapat memberikan pelajaran wirausaha. Untuk menentukan mata pelajaran yang sesuai, sekolah dapat menganalisis kondisi geografis di daerahnya.

3. *Potensi sekolah*

KTSP Pendidikan Layanan Khusus (PLK) menjadi bagian dari penyusunan KTSP sekolah yang mengakomodasi peserta didik yang berada dalam kategori sosial ekonomi rendah. Untuk itu diperlukan kesiapan sekolah dalam pelayanan tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah:

a. Sarana prasarana

Kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana sangat menunjang pelaksanaan KTSP. Perlu diperhatikan kondisi dan jumlah kelas, media pembelajaran, laboratorium, ruang praktikum, dan perpustakaan.

b. Peserta didik

Diperlukan analisis untuk mengetahui peserta didik yang berada dalam kategori sosial ekonomi rendah. Perlu diperhatikan peserta didik yang tidak dan sambil bekerja. Yang melanjutkan dan tidak melanjutkan. Data diperlukan untuk menentukan kebijakan dalam memberikan layanan khusus kepada mereka.

c. Pendidik dan tenaga kependidikan

Perlu dipersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu melayani pendidikan layanan khusus, khususnya pendidik yang mengampu mata pelajaran produktif pada SMK dan vokasi pada SMA.

4. *Berkoordinasi dengan:*

a. Komite Sekolah

Sekolah yang menerima peserta didik dengan sosial ekonomi rendah harus memberikan informasi ini kepada komite sekolah, agar dalam

penyelenggaraan pembelajarannya dapat berjalan lancar. Dan penyelenggaraan ini harus didukung oleh komite sekolah.

b. Dinas Pendidikan setempat

Sekolah juga harus menginformasikan kepada Dinas Pendidikan kalau di sekolahnya ada peserta didik dari sosial ekonomi rendah dan diberlakukan pengelolaan waktu dan pembelajaran yang berbeda.

KTSP yang dikembangkan oleh sekolah harus dirancang agar semua peserta didik mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, di samping melayani peserta didik dari keluarga yang berkecukupan, sekolah juga harus menyelenggarakan pendidikan layanan khusus khususnya bagi peserta didik dari sosial ekonomi rendah.

B. Penekanan dalam Pengembangan KTSP

Dalam pengembangan KTSP, sekolah harus berpijak pada panduan yang dikeluarkan dari BSNP, disamping itu dapat memperhatikan 4 aspek berikut ini:

1. Prinsip Pengembangan KTSP PLK

a. *Fleksibel*

Untuk pendidikan layanan khusus, sekolah memberikan fleksibilitas waktu kepada peserta didik. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pada layanan waktu belajar dan lama waktu belajar. Layanan waktu belajar dimaksudkan dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menempuh waktu belajar pada pagi atau sore hari. Layanan belajar pada sore hari ditujukan bagi peserta didik yang bekerja pada pagi hari. Layanan lama belajar dimaksudkan dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengatur lama masa belajar. Bagi peserta didik yang ingin segera menyelesaikan masa belajarnya dapat menempuh waktu 2 tahun. Tetapi, bagi peserta didik yang membagi waktu untuk bekerja dapat menempuh masa belajar selama 4 tahun. Yang perlu diperhatikan dalam layanan ini adalah pendekatan belajar *mastery learning*. Untuk itu, sekolah dapat melaksanakan sistem pembelajaran SKS.

KTSP yang dirancang sekolah bertujuan agar semua peserta didik mencapai Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar yang sama. Namun di dalam pengelolaan waktu dan pembelajarannya harus dibedakan antara peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi yang cukup dengan sosial ekonomi yang rendah. Karena pada umumnya peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi rendah belajar sambil bekerja, artinya dia akan belajar di sela-sela dia melakukan pekerjaannya.

Pengelolaan waktu dibedakan dengan mengatur penambahan alokasi waktu 4 jam pelajaran setiap minggu. Peserta didik dari sosial ekonomi rendah cukup diberikan penambahan waktu 4 jam untuk mata-mata pelajaran yang menunjang kompetensi akademiknya. Namun bagi peserta didik dari sosial ekonomi rendah diberikan penambahan waktu 4 jam untuk mata pelajaran yang menunjang kompetensi kecakapan hidup.

b. *Competence*

KTSP bertujuan untuk memberikan kompetensi-kompetensi pada mata setiap mata pelajarannya. Namun bagi peserta didik yang termasuk dalam kategori dari keluarga sosial ekonomi rendah diberikan kompetensi tertentu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Artinya, sekolah memberikan pelayanan kepada siswa dengan kompetensi yang ditujukan ke arah vokasi dan sedapat mungkin bisa mendapatkan penghasilan dari kompetensi itu.

c. *Independent*

Dengan diberikan kompetensi tertentu, diharapkan kompetensi itu diwadahi dalam mata pelajaran sendiri, tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Sehingga dapat dikatakan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran ini dapat berupa keterampilan/kejuruan dan Muatan Lokal. Mata pelajaran keterampilan/kejuruan diarahkan guna kelangsungan setelah siswa lulus. Disamping itu, perlu dipikirkan pengelolaan mata pelajaran Mulok yang diberikan, agar tidak terjadi adanya benturan dari Dinas setempat dalam pemberian Mulok ini. Untuk itu perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas.

d. *Confident*

Kompetensi yang mengarah ke vokasi ini dapat dijadikan bekal bagi siswa dalam menunjang dan mendapatkan penghasilan bagi dirinya. Sehingga siswa tumbuh dan mempunyai kepercayaan diri ketika akan dan setelah lulus sekolah.

2. Karakteristik Peserta Didik

Dalam pengembangan KTSP perlu juga diperhatikan permasalahan yang mungkin muncul pada siswa kategori sosial ekonomi rendah di sekolah, yakni:

a. *Siswa bekerja dan punya waktu*

Siswa dengan kategori ini adalah siswa yang bekerja paruh waktu yakni siswa yang bekerja setelah atau seusai sekolah. Pekerjaan yang dimiliki bertujuan untuk membantu orang tua dalam mencari penghasilan. Permasalahannya adalah siswa dengan kategori ini tidak memiliki waktu cukup untuk belajar di rumah atau menyelesaikan tugas yang diberikan guru, baik secara perseorangan maupun kelompok. Untuk menyelesaikan masalah seperti itu, sekolah hendaknya memberikan layanan yang sesuai dan tepat. Salah satu alternatif layanan yang dapat diberikan kepada siswa dengan kategori ini adalah pelayanan masa belajar atau penyelesaian tugas yang fleksibel.

b. *Siswa bekerja dan tidak punya waktu*

Siswa dengan kategori ini adalah siswa yang bekerja pada jam sekolah. Pekerjaan yang dilakukannya tidak berdasarkan waktu yang tetap, bisa pagi, siang, atau sore. Dengan pekerjaan seperti itu, siswa terpaksa sering tidak masuk sekolah atau sering terlambat. Salah satu alternatif layanan yang dapat diberikan kepada siswa dengan kategori ini adalah penggunaan modul (job sheet) dengan penyelesaian masa belajar atau penyelesaian tugas yang fleksibel.

c. *Siswa ingin bekerja/berwirausaha*

Siswa dengan kategori ini adalah siswa yang berkeinginan untuk bekerja atau berwirausaha setelah menyelesaikan sekolahnya. Salah satu alternatif pelayanannya adalah pelaksanaan sistem SKS dengan penentuan mata diklat yang ditawarkan. Pelaksanaannya dapat digunakan berbagai cara, seperti pengadaan pendidik di bidang vokasi, bekerja sama dengan sekolah kejuruan, Balai Latihan Kerja (BLK), atau perusahaan. Selain itu, pembentukan kelompok wirausaha juga merupakan alternatif layanan yang dapat diberikan.

d. *Siswa ingin melanjutkan pendidikan*

Siswa dengan kategori ini adalah siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi siswa kategori ini, selain bekal kemampuan

belajarnya kurang dikarenakan tidak adanya fasilitas atau daya dukung, biaya untuk melanjutkan pendidikan pun tersendat. Alternatif layanan yang dapat diberikan adalah penambahan jam pelajaran tertentu (layanan individual) dengan tenaga pendidik yang sesuai dengan jenis pendidikan yang akan ditempuhnya. Selain itu, pihak sekolah hendaknya mengusahakan beasiswa dari pihak lain untuk membantu pembiayaannya.

3. Perlakuan Khusus

Setelah memperhatikan prinsip pengembangan dan karakteristik dalam pengembangan KTSP, sekolah dapat memberlakukan sistem sebagai berikut:

a. *Switch*

Perlakuan ini dimungkinkan hanya dilaksanakan di SMA, dimana peserta didik dari SMA dapat memperoleh beberapa kompetensi di SMK yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu diperlukan: kerja sama antara SMA dan SMK, analisis minat dan kemampuan dari peserta didik SMA, dan dukungan dari kedua pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua/wali murid. Jika dipandang perlu sistem dapat diterapkan (meski persentasinya kecil) bagi peserta didik dari SMK yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dengan cara mendapatkan beberapa kompetensi dari SMA. Untuk itu diperlukan: kerja sama antara SMK dan SMA, analisis minat dan kemampuan dari peserta didik SMK, dan dukungan dari kedua pihak sekolah, peserta didik, dan orang tua/wali murid.

b. *Penerapan SKS*

Membuka kesempatan bagi besar peserta didik yang membagi waktu untuk bekerja dapat menempuh masa belajar selama 4 tahun. Yang perlu diperhatikan dalam layanan ini adalah pendekatan belajar *mastery learning*. Untuk itu, sekolah dapat melaksanakan sistem pembelajaran SKS.

c. *Pengaturan Jadwal Khusus*

Pembelajaran tidak hanya terbatas ruang dan waktu, karena belajar tidak hanya terpaku pada dinding kelas dan jadwal sekolah. Sebagai pemecahan yang dilakukan apabila peserta didiknya tidak selalu bisa hadir di sekolah dan mengikuti jadwal sekolah adalah salah satunya dengan tutorial, moduler, model rumah singgah ataupun dengan bentuk lain. Ini dilakukan agar peserta didik yang tidak mempunyai waktu khusus untuk sekolah dapat tetap sekolah sekaligus melakukan aktivitas yang biasa dilakukannya, yang biasanya mencari uang untuk membantu orang tuanya.

d. *Pemberdayaan ekonomi*

Kecenderungan bagi peserta didik dari sosial ekonomi rendah, adalah selama sekolah dan setelah lulus dari sekolah bisa mendapatkan penghasilan. Bagi peserta didik seperti ini dapat diberdayakan tenaga dan pikirannya, yaitu diberi bekal sejumlah kompetensi yang menunjang untuk mendapat penghasilan. Selain kompetensi yang diberikan, peserta didik juga diberikan motivasi kuat agar mereka mampu mandiri dan tumbuh jiwa “usaha”nya.

4. Tujuan Akhir

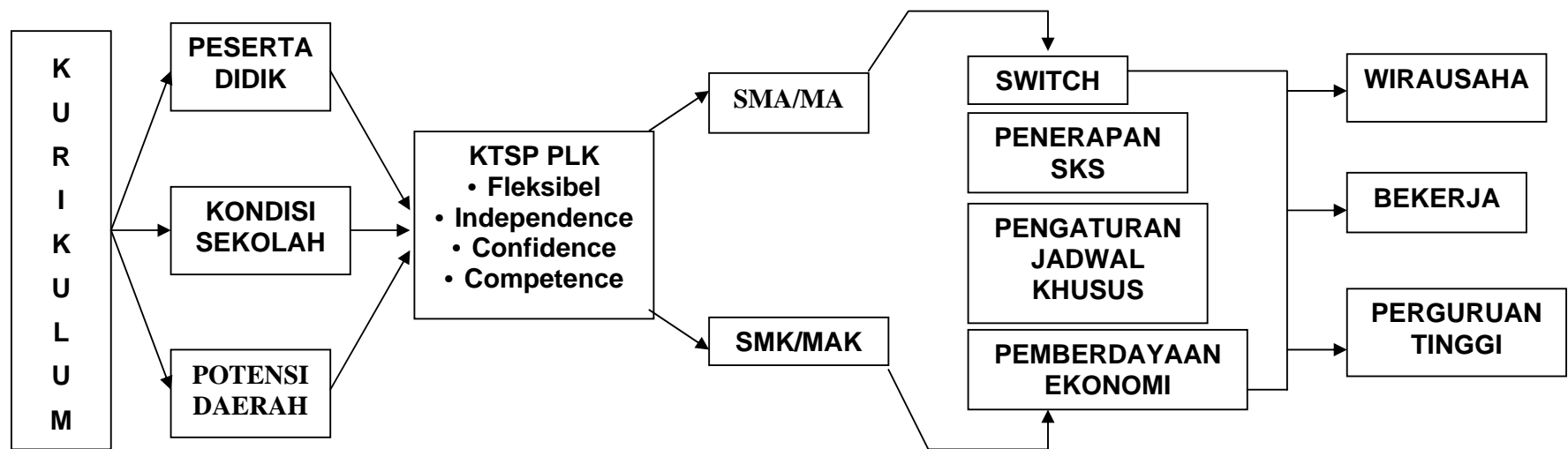
Pengembangan KTSP PLK ini mempunyai tujuan akhir bagi peserta didiknya, yaitu:

- a. *Wirausaha*
Selain diberikan sejumlah kompetensi dalam usaha menunjang peserta didik dalam mendapatkan penghasilan, mereka juga diberikan bekal motivasi yang kuat untuk bisa mandiri dan tumbuh sebagai pencipta lapangan kerja.
- b. *Bekerja*
Pemberian sejumlah kompetensi yang menunjang bagi peserta didik mendapatkan pekerjaan, untuk itu sekolah memberikan kompetensi-kompetensi yang sedang dibutuhkan oleh pihak luar.
- c. *Melanjutkan*
KTSP PLK juga memberikan peluang dan kesempatan bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam prestasi akademik untuk melanjutkan Perguruan Tinggi.

C. Pengembangan Selanjutnya

Melihat realita permasalahan yang ada pada jenjang pendidikan menengah berkaitan dengan kebutuhan dunia luar, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus. Pembekalan karakteristik kompetensi tertentu yang berbeda antara SMA dan SMK perlu dijembatani agar pendidikan menengah dapat memberikan layanan yang lebih variatif. Perlu dipikirkan pengembangan konsep *multi exit multi entry* pada jenjang pendidikan menengah. Khususnya peserta didik kategori sosial ekonomi rendah dapat memperoleh layanan khusus melalui kebijakan tersebut. Penggunaan sistem SKS akan menjadi pilihan dan jika perlu dibuatkan kurikulum khusus untuk mereka.

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PLK
SOSIAL EKONOMI RENDAH**



BAB IV METODOLOGI

A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk:

1. Workshop Penyusunan Desain, yaitu dengan menyusun program kerja dan desain kegiatan. Langkah kerjanya adalah dengan mengkaji berbagai informasi tentang: data dan deskripsi masyarakat dengan sosial ekonomi rendah dan kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan peserta didik dalam kelompok, dan pengaruh dari sosial ekonomi rendah terhadap pendidikan
2. Workshop Kajian Konsep, yaitu dengan mengeksplorasi konsep-konsep pengembangan model
3. Workshop Kajian Kebutuhan Lapangan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan lapangan
4. Rapat Kerja Penyusunan Kerangka Model, yaitu agar dapat memperoleh kerangka model
5. Rapat Kerja Penyusunan Model, yaitu agar dapat memperoleh desain model
6. Ujicoba Model, agar memperoleh masukan dari lapangan Dokumen ujicoba
7. Analisis Hasil Ujicoba, agar mendapatkan hasil dari ujicoba lapangan
8. Rapat Kerja Perbaikan Model, agar memperoleh desain model yang sudah diperbaiki
9. Seminar dengan Presentasi Model, yaitu dengan jalan memaparkan hasil ujicoba
10. Rapat Kerja Penyempurnaan Model, yaitu dengan jalan menyempurnakan model
11. Rapat Kerja Penyusunan Laporan, yaitu dengan jalan menyusun laporan

B. Strategi kegiatan

Strategi yang diterapkan untuk mencapai kegiatan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut:

1. *Pleno: Brain Storming*
Pada sesi ini peserta kegiatan diberikan penjelasan berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan pada pengembangan model KTSP Pendidikan Khusus, agar masing-masing peserta memahami secara utuh pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, tugas-tugas yang harus diembannya dan target yang harus dicapai selama rentang waktu kegiatan yang tersedia.
2. *Kerja Kelompok*
Peserta selanjutnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja agar target yang akan dicapai terbagi habis dan pekerjaan lebih fokus. Pada sesi ini peserta menuangkan gagasan dan/atau pemikiran secara individual, kemudian hasilnya dikompilasi, didiskusikan, dan diselaraskan dengan gagasan dan/atau pemikiran peserta lain dalam kelompok kerja untuk dijadikan sebagai hasil kerja kelompok.
3. *Presentasi*
Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dipresentasikan. Pada sesi ini peserta dapat saling memetik pengalaman dan gagasan dan/atau pemikiran dari peserta lainnya untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang pada gilirannya dapat digunakan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

D. Unsur yang Terlibat

1. Ahli, dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum dan pendidikan di SMA dan SMK.
2. Guru, dipilih berdasarkan pengalaman mereka selama ini di SMA dan SMK.
3. Unit terkait, dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum dan pendidikan di SMK.
4. Responden di daerah, adalah semua orang ditentukan dan yang terkait dengan pengembangan model kurikulum ini.